

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN DALAM
PENANGANAN KEBAKARAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ERDA YULIANA
NPM ;157310206

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini berjudul **“Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Kebakaran’**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana social pada fakultas ilmu social dan ilmu politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru .

Dalam usaha untuk menyelesaikan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik,waktu ,tenaga, kritik, saran,dan kerja sama diskusi pihak-pihak yang berkopeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH. MCL yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada fakultas ilmu social dan ilmu politik
2. BapakDr.H.MorisAdidiYogia, M.SiselakuDekanFakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitikUniversitas Islam Riau
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP,M.Si SebagaiKetua Program Studi Ilmu Pemerintahan

4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan berusaha maksimal mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dengan benar hingga dapat di seminarkan.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis disaat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.
7. Kepada Keluarga Tercinta Ayah dan ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil. Sehingga mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat lagi di jabarkan lagi sebagaimana terimakasih ini juga di sampaikan teruntuk kakanda tersayang dan juga segenap keluarga besar.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Ilmu Pemerintahan	13
2. Manajemen Pemerintahan.....	15
3. Pengertian Pelayanan	15
4. Otonomi Daerah.....	17
5. Kepamong Praja.....	17
6. Teori Kepemimpinan	19
7. Manajemen Pemadam Kebakaran	20
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Konsep Operasional	25
E. Operasional Variabel.....	28
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan dan Key Informan.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	35
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	36
Gambaran Umum Penelitian	36
A. Keadaan Geografi.....	36
B. Visi Misi Kabupaten Pelalawan	39
C. Profil SKPD Kabupaten Pelalawan.....	39
D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.. ...	40
E. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	47

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Identitas Responden	59
B. Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Kebakaran.....	60
1. Tahap Pemberangkatan Awal.....	61
2. Tahap Pemberangkatan Lanjutan	64
3. Tahap Operasional Pemadaman	66
4. Tahap Penyelamatan.....	69
5. Pemadaman Selesai.....	73
C. Hambatan Dari Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Kebakaran	75
BAB VI : PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Sarana Pendukung Dari satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dari Tahun 2016 Sampai 2018	9
I.2 : Intensitas Kebakaran di Kabupaten Pelalawan Tiga Tahun Terakhir.....	10
I.3 : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.....	10
II.1 : Penelitian Terdahulu	22
II.2 : Operasional Variabel.....	28
III.1 : Jumlah Informan	32
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
IV.1 : Armada Satuan Polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.....	43
IV.2 : Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan	47
V.1 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
V.2 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran.....	24
IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.....	51
VII.1: Gambar.....	82



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erda Yuliana

NPM : 157310206

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Kebakaran

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya Saya sendiri (tidak karya plagiat) yang Saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah –kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa Saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah Saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas

Demikian persyaratan ini Saya buat dengan kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Pelaku Pernyataan



Erda Yuliana

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENANGANAN KEBAKARAN

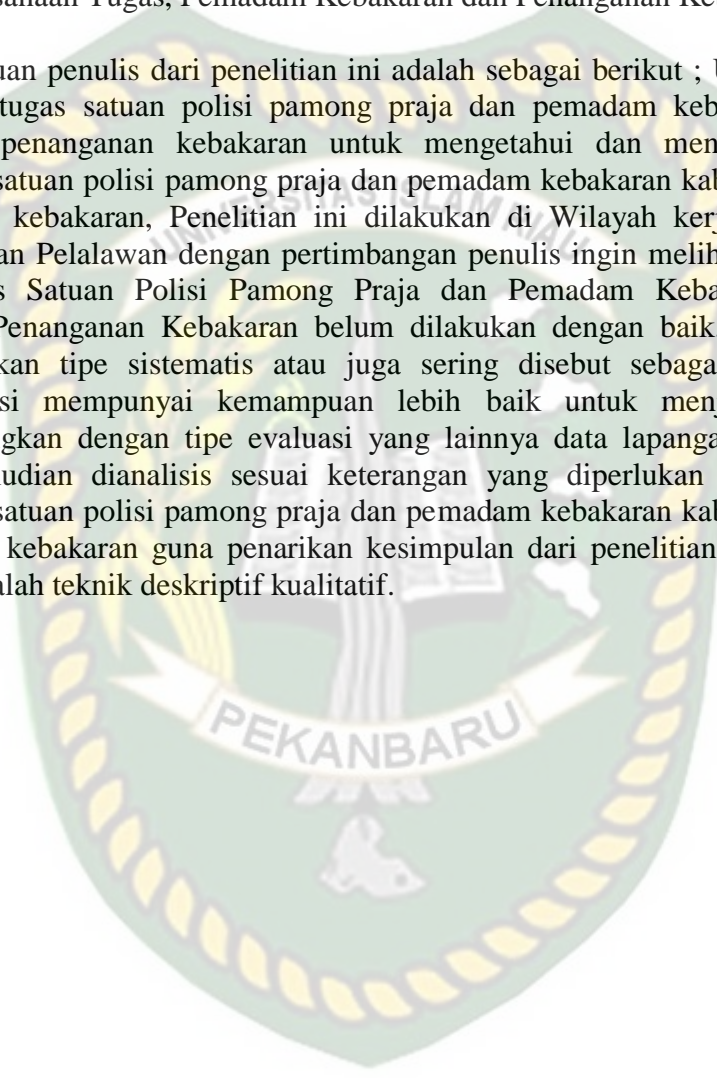
ABSTRAK

ERDA YULIANA

157310206

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Pemadam Kebakaran dan Penanganan Kebakaran

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; Untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan dalam penanganan kebakaran untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan dalam penanganan kebakaran, Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pelalawan dengan pertimbangan penulis ingin melihat mengenai hasil Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam Penanganan Kebakaran belum dilakukan dengan baik, adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya data lapangan terlebih dahulu ditabulasikan, kemudian dianalisis sesuai keterangan yang diperlukan seperti mengenai pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan dalam penanganan kebakaran guna penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Maka teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.



**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS AND
FIRE EXTINGUISHERS IN PELALAWAN REGENCY IN FIRE HANDLING**

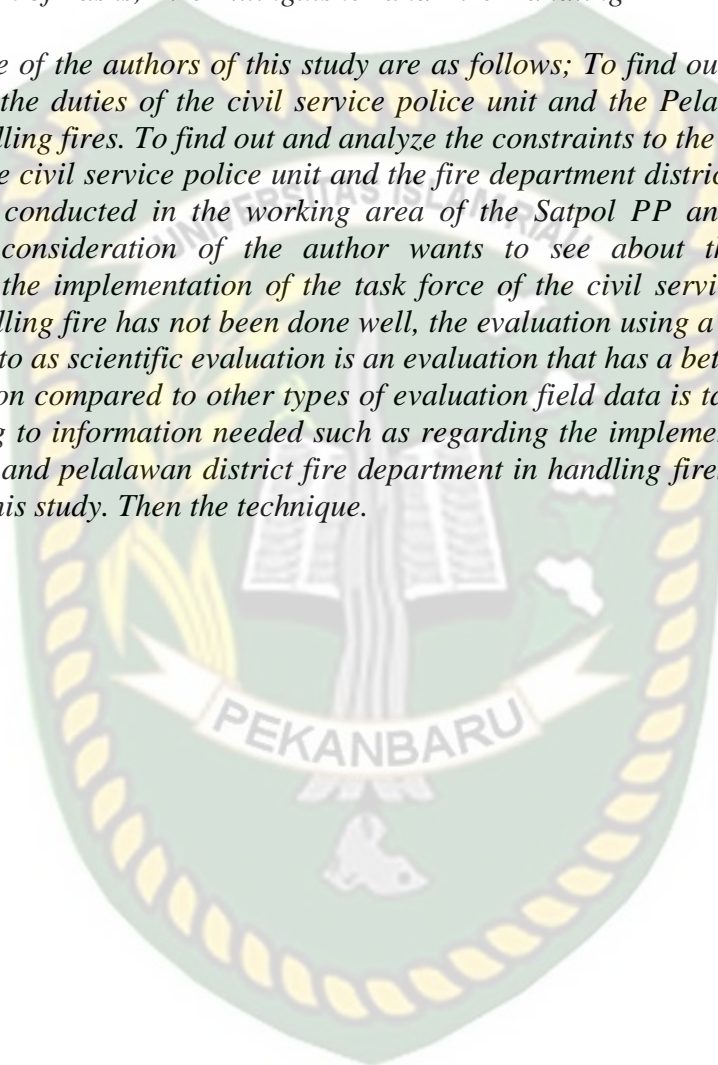
ABSTRACT

ERDA YULIANA

157310206

Keywords : Exeution of Tasks, Fire Extinguisher and Fire Handling

The purpose of the authors of this study are as follows; To find out the results of the implementation of the duties of the civil service police unit and the Pelalawan district fire department in handling fires. To find out and analyze the constraints to the implementation of the task force of the civil service police unit and the fire department district in handling fire, this research was conducted in the working area of the Satpol PP and Pelalawan Fire Department with consideration of the author wants to see about the results of the implementation of the implementation of the task force of the civil service police and fire department in handling fire has not been done well, the evaluation using a systematic type or also often referred to as scientific evaluation is an evaluation that has a better ability to carry out policy evaluation compared to other types of evaluation field data is tabulated first, then analyzed according to information needed such as regarding the implementation of the task of the civil service and pelalawan district fire department in handling fires in order to draw conclusions from this study. Then the technique.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di bagi dalam Daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil, di daerah-daerah yang bersifat otonomi (*Streek en localerechtgemen schappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Untuk mepermudah penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah besar dan kecil, sebagai mana yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dnegan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan yang bersifat istimewa.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, aparatur pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pelayanan secara terus menerus dengan cara pembenahan optimalisasi standar pelayanan dengan prinsip cepat, tepat, memuaskan, transparan dan non diskriminatif.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pmerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (asas Medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka dari uraian tersebut diatas selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ayat (1) dikatakan :urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota yang meliputi:

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan kearsipan

Ndraha sependapat dengan Saefullah. Adanya klasifikasi pelayanan pemerintah ditegaskan Ndraha (2003:65) dengan menyatakan bahwa :’jadi pelayanan dalam kybernologi adalah pelayanan publik dan pelayanan civil dalam arti proses, produk, dan *outcome* yang bersifat istimewa yang dibutuhkan oleh manusia dan diproses sesuai dengan aspirasi manusia pula.’ Pembedaan pelayanan pemerintah atas publik dan civil dimaksud didasarkan pada pemahaman bahwa kebutuhan istimewa manusia dalam hubungannya dengan pemerintahan adalah kebutuhan jasa publik dan layanan civil.

Adapun urusan-urusan wajib yang diserahkan pada Daerah Kabupaten dan Kota adalah:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penyelenggaraan pendidikan penanggulangan masalah sosial.
- f. Pelayanan bidang ketenagakerjaan, kependudukan.
- g. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- h. Pelayanan administrasi umum, penanaman modal.
- i. Urusan wajib lainnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa urusan wajib yang ada tersebut maka salah satu yang di jalankan oleh pemerintah kabupaten Pelalawan adalah penanggulangan masalah sosial yang dalam hal ini penanganan kebakaran. Untuk menangani bahaya kebakaran khususnya di Kabupaten Pelalawan, telah didirikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran oleh pemerintah Kabupaten yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan merupakan instansi pemerintah yang dikhususkan untuk menangani masalah penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, berupa bantuan dan aksi untuk menanggulangi dan mencegah bencana kebakaran.

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi UU

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. UU No. 23 Tahun 2014 juga memasukkan fungsi pemadam kebakaran ke dalam organisasi Satpol PP

Berdasarkan peraturan Daerah No 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugasnya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang selalu membuat mereka bersemangat dalam bekerja, adapun tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran kabupaten Pelalawan yaitu:

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran.
2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan yaitu melayani masyarakat dalam bidang perizinan/rekomendasi pengawasan bangunan dalam hal pencegahan kebakaran dan menggali pendapat asli daerah melalui pugutan redistribusi.

Bentuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :

- Pemadaman Kebakaran
- Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan
- Pertolongan pada keadaan darurat
- Sosialisasi mengenai kebakaran pada siswa sekolah

Pemadam kebakaran merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, berupa bantuan dalam aksi untuk menanggulangi dan mencegah kebakaran (Perda No 09 Tahun 2016)

Susunan Organisasi Satpol PP dan Pemadam kebakaran kabupaten Pelalawan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Satpol PP dan Pemadam kebakaran;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Umum;
- d. Seksi Pembinaan Operasional;
- e. Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dari struktur organisasi yang ada diketahui bahwa penanganan kebakaran dilakukan oleh Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang bertanggung jawab terhadap Kepala Satpol PP dan Pemadam kebakaran

Standaroperasional pelayanan (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, dengan menggunakan prinsip good governance yaitu diantaranya harus transparansi dan akuntabilitas. Sehingga masyarakat mengetahui secara jelas, pasti tentang urusan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

Adapun tahap – tahap penanggulangan kebakaran adalah sebagai berikut.

1. Tahap Pemberangkatan Awal

- a. Informasi kejadian kebakaran dapat diterima antara lain dari petugas Kantor Pemadam Kebakaran yang melihat sendiri kejadian, laporan dari masyarakat langsung, dari instansi lain atau media cetak dan elektronik.
- b. Dalam hal informasi kejadian kebakaran tersebut oleh petugas piket, hal yang perlu diketahui adalah nama penelepon, alamat bangunan atau gedung yang terbakar, fungsi atau peruntukan bangunan, jam kejadian dan titik kenal.
- c. Setiap petugas pada tiap pos harus memperhatikan dan mematuhi segala perintah Komandan pengerahan mobil pemadam kebakaran menuju tempat kejadian kebakaran.
- d. Pengerahan mobil kebakaran tersebut meliputi satu unit mobil pompa, satu unit mobil submersible pump (pumper) dan mobil rescue. Pengerahan mobil pemadam tersebut harus dari pos pembantu terdekat dari kejadian kebakaran.
- e. Waktu tanggap (*respon time*) terhadap memberitahukan sampai pelayanan pemadam kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri dari; pertama, waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 (lima) menit. Kedua, waktu perjalanan dari pos pemadam menuju kelokasi kebakaran selama 5 (lima) menit. Ketiga, waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5(lima) menit.

2. Tahap Pemberangkatan Lanjutan

- a. Apabila dipertimbangkan tindakan pemadami mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air atau kemampuan teknis lain, maka komandan plenton/regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada pos induk.
- b. Pengerahan bantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan bantuan dari komandan peleton/regu dari unit pemadaman yang tiba pertama kali di tempat kejadian kebakaran.
- c. Bantuan unit pemadam kebakaran tersebut harus dikerahkan sesuai kebutuhan dari pos pembantu terdekat kejadian kebakaran.

3. Tahap Operasional Pemadaman

- a. Operasi pemadaman dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu:
 - a. *Size up*, yaitu menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung.
 - b. *Lacote*, yaitu melokalisir api agar tidak menjalar keberbagai tempat.
 - c. *Confine*. yaitu mencari sumber api saat pemadaman berlangsung.
 - d. *Extinguish*, yaitu melakukan tindakan pemadaman api.

- b. Dalam melakukan operasi pemadaman, petugas pemadaman berkewajiban berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran, mengenakan perlengkapan perlindungan perorangan sesuai setandar dan memperhatikan taktik dan strategi pemadaman.

4. Tahap Penyelamatan

- a. Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi dilokasi kebakaran.
 - b. Operasi penyelamatan tersebut dilakukan dengan cara mencegah penyebaran api dan menemukan orang-orang yang terperangkap dalam bangunan terbakar.
 - c. Dalam melakukan tindakan penyelamatan, regu penyelamat berkewajiban mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan, mengenakan perlengkapan pelindung perorangan yang sesuai setandar, masuk lokasi sekurang-kurangnya 2 orang berpasangan dan dengan sepengetahuan komandan pleton/regu, menggunakan tali pemandu dan mencari korban yang perlu diselamatkan.
- d. Pemadaman Selesai
- a. Kebakaran dinyatakan padam setelah benar-benar tidak ada api dan tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar-sinar dari dara api.
 - b. Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan penyisiran pada tempat atau ruang tersembunyi untuk menemukan korban-korban api yang mungkin masih menyala.
 - c. Dalam hal operasi pemadaman selesai, maka seluruh petugas segera membenahi serta mengecek kelengkapan dan seluruh peralatan yang digunakan.

Selain itu dalam mengendalikan kebakaran yang terjadi di kabupaten

Pelalawan maka dapat dilihat beberapa sarana pendukung dari Satuan Polisi Pamong

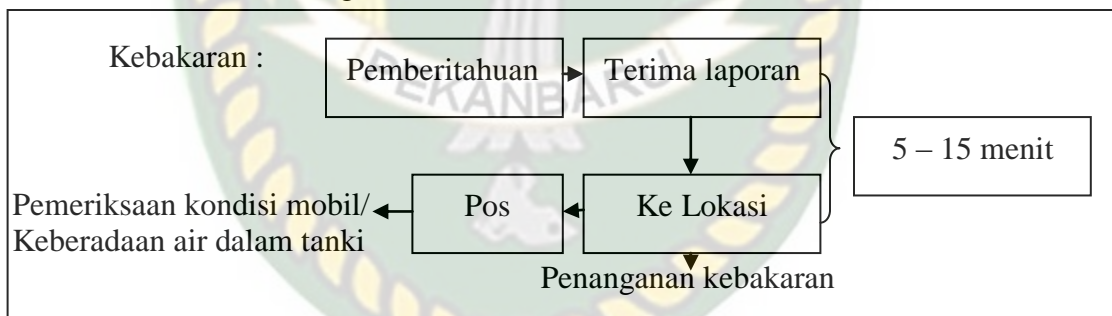
Praja dan pemadam kebakaran dari tahun 2016 hingga 2018 antara lain :

Tabel I.1. Sarana pendukung dari Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dari tahun 2016 hingga 2018

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor dan garasi	1 Unit
2	Mobil Pemadam Kebakaran	8 Unit
3	Pos pemantu pemadam kebakaran	3 Pos
4	Waduk/bak	1 Buah
5	Selang kebakaran	10 Buah
6	Baju anti api	4 Set
7	Baju anti panas	4 Set
8	Tabung oksigen	2 Buah
9	Racun api tabung kering	4 Buah
10	Mesin pompa portable 2 buah	2 Buah

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam KebakaranPelalawan 2018

Mekanisme pelayanan berdasarkan SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Pelalawan sebagai berikut :



Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam KebakaranPelalawan 2018

Berikut dapat disajikan intensitas kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan selama tiga tahun terakhir yaitu

Tabel I.2. Intensitas kebakaran di Kabupaten Pelalawan tiga tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah kebakaran	Jumlah rumah/ruko	Keterangan
1	2016	5	15 rumah dan 5 ruko	- Rumah / Pertokoan
2	2017	7	14 rumah dan 7 ruko	- Rumah / Pertokoan
3	2018	3	8 rumah dan 0 ruko	- Rumah / Pertokoan

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan 2018

Dengan melihat data table diatas maka diketahui bahwa untuk tahun 2017 telah terjadi kebakaran yang paling banyak sebanyak 7 kali kebakaran baik rumah maupun pertokoan, hal ini belum semua dapat di tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadaman kebakaran secara maksimal

Namun masih ada di temui kelemahan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini dalam meberika pelayanannya seperti selalu terlambat untuk menangani kebakaran yang terjadi sehingga kondisi api sudah besar baru petugasnya datang.

Tabel I.3. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

No	Status/Kedudukan	Jumlah (orang)
1	PNS Staf	3
2	PNS Operasional	10
3	Pegawai Honorer Ops. Lapangan	66
4	Pegawai Tidak Tetap	1
Jumlah		80

Sumber data :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

Namun berdasarkan pra survey dan kesan yang berurusan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengemukakan adanya gejala-gejala kelalaian aparaturnya pemerintah khususnya dalam melayani masyarakat untuk menangani kebakaran di Kabupaten Pelalawan, antara lain :

1. Penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan cenderung lambat karena selalu terjadi pemadaman terlambat datang ke lokasi dan api sudah membesar.
2. Diketahui armada pemadam kebakaran kurang standby karena selalau di ketahui petugas selalu datang setelah kebakaran terjadi dan api yang ada hampir padam, selain itu juga jumlah armada yang ada kurang dan jauh letaknya hanya di pusat Kota saja yaitu di kantor Dinas Pemadam dan Satpol PP saja tidak di setiap kecamatan.

Berdasarkan dari pada fenomena yang terlihat diatas maka disini penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengambil judul : **Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penangan kebakaran**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ada tergambar dalam latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penangan kebakaran

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan TugasSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penangan kebakaran
 2. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan TugasSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penangan kebakaran
2. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan masukan kepada instansi yang bersangkutan dalam Pelaksanaan TugasSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penangan kebakaran
 2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang mengambil masalah yang sama



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu pemerintahan

Ilmu pemeritahaan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koorSatuan Polisi Pamong Praja dani dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga dan antar memerintah dengan yang diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintah, Syafiie (2001;20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ; ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz dalam Syafiie (2001;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan Terlaksana secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Menurut Rosental (dalam Syafiie,2001;21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Kemudian menurut Poeljo (dalam syafiie,2001; 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara

bagaimana lembaga pemerinthan umum ini disusun dan difungsikan baik secara kedlam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2003;24) Pemerintahan adalah semua Satuan Polisi Pamong Praja dan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban mentaati dan mengikuti pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Sedarmayanti (2004;35), Pemerintah atau Government adalah lembaga atau Satuan Polisi Pamong Praja dan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan Kepemerintahan atau Governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Suryaningrat (1992;11) mengatakan pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah. Menurut Pamudji (1986;23) pemerintahan yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau Satuan Polisi Pamong Praja dan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merapakan suatu perintah).

Menurut Kansil (2003;225) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga Negara.

Menurut Nurcholis (2004;178-179) pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama; 1) memberikan layanan/service baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak, 2) melakukan pembangunan

pasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 3) memberikan perlindungan protektif masyarakat.

2. Manajemen Pemerintahan

Pada saat ini, pemerintah baik tingkat kota sampai tingkat desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing - masing. Hal ini telah diatur pada Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Musanef (dalam Syafie,2001;36) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan-Satuan Polisi Pamong Praja dan itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap Satuan Polisi Pamong Praja dan umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koorSatuan Polisi Pamong Praja dani pengawasan ke dalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang dipintah dapt diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efesien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas negara, sihinggadiperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tugas negara.

3. Pengertian Pelayanan

Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu kegiatan tersebut merupakan suatu proses, pelayanan yang berlangsung secara rutin

dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan manusia. Pelayanan merupakan pekerjaan yang setiap hari dilakukan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat. Secara umum pelayanan adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Menurut Sianipar (2004:7) “Pelayanan Prima atau *Excelent Service* adalah pelayanan yang terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu lalu”.

Menurut Sampara (dalam Sinambela, 2011:4), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat menuntut kinerja aparat pemerintah termasuk aparat Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) agar memiliki profesionalisme kerja yang baik sehingga akan tercapai kualitas aparat yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau sekelompok orang. Melayani adalah meladeni atau membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Melayani dapat diartikan menyambut, menerima seseorang, sekelompok orang. Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan maka penulis mengambil pengertian dari masing-masing

kata. Kualitas menurut kamus umum Bahasa Indonesia (2001:528), kualitas adalah baik buruk suatu benda atau keadaan suatu benda”.

3. Otonomi daerah

Secara teoretis, Huseini (2000, 34-35) meyakini bahwa kebijakan desentralisasi dalam proses pembangunan mampu memberikan beberapa manfaat positif untuk terciptanya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Bahwa desentralisasi yang demokratis menjamin terciptanya efektivitas pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal daripada program pembangunan yang sentralistis
2. dengan desentralisasi dan otonomi daerah upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta pro-aktif kelompok masyarakat miskin dapat terlaksana secara efektif dengan desentralisasi yang berwujud otonomi daerah, akses masyarakat terhadap kewenangan administrasi pemerintahan menjadi semakin dekat dan semakin terbuka

4. Kepamong Prajaan

Pamongpraja dengan jiwa kepemimpinan astabrata diharapkan dapat memberikan kesejukan dan ketenteraman kepada warganya, mampu mencegah potensi kejahatan dan menindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakatnya dengan tegas tanpa pandang bulu, mampu bersifat bijaksana, sabar, ramah kepada siapa pun dan lemah lembut kepada mereka yang lemah dan fakir, melihat, mengerti

serta menghayati problematika seluruh warganya, dapat memberikan kesejahteraan dan bantuan kepada warganya yang memerlukannya serta menjadi pelita bagi warganya, mampu menampung segala sesuatu yang datang kepadanya, baik yang menyenangkan baginya maupun yang tidak menyenangkan, memiliki mental yang kuat dan gigih dalam menghadapi dan menangani ancamanyang datang dari luar.

Menurut Suryaningrat, pamongprja dipergunakan untuk menyebut mereka yang merupakan pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah melal<sanakan umsan pemerintahan umum. Oleh sebab itu, pamongpraja mempunyai arti luas dan sempit.

Dalam arti luas, pamongpraja mencakup segenap pegawai dalam lingkungan pemerintah pusat dan bekerja di daerah dalam rangka melalaanakan umsan pemerintahan pusat atau pemerintahan umum. Dalam arti sempit, pamongpraj ahanyamencakup mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif, Sehingga yang dimaksud pamongpraja sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 1959 bahwa pamongrraja adalah gubernur residen, bupati, walikota, wedana dan asisten wedana (camat), maka dari peraturan pemerintah tersebut diperoleh perumusan pamongpraja sebagai perangkat atau pejabat yang ada di daerah yang bertugas melal<sanakan urusan pemerintahan umum sekaligus urusan pemerintahan pusat di daerah.

Konsekuensinya, selama di daerah masih ada umsan pemerintahan umum, maka selama itu pula pamongpraja akaterusada. Sejarah perkembangan kepamongrrajaan di Indonesia taklepas dari tugas-tugas atau urusan pemerintahan umum, karena secara

fungsional keberadaan pamongpraja adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum.

5. Teori kepemimpinan

Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dalam mengarahkan atau mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2009:119) bahwa Pemimpin (leader), adalah :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukansesuatu sesuai dengan yang diinginkannya.
2. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kepemimpinan.
3. Kata ” pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang/kelompok orang pada hierarkitertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yangbersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawab

Berdasarkan pemaparan diatas,dapat dipahami bahwa Kekuasaan seorang pemimpin bersumber dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain karena sifat,sikap, luas pengetahuan, pengalaman dan kepandaian berkomunikasi dalam hubungan- hubungan interpersonal Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan

6. Manajemen Damkar

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran diperkotaan, manajemen proteksi kebakaran gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon dan pemulihan akibat kebakaran.

Selain itu setiap pemilik/pengguna gedung juga harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran (Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2009).

Prosedur tanggap darurat kebakaran mencakup kegiatan pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan rencana pengaman kebakaran dan rencana tindak darurat kebakaran (Kementerian PURI, 2009).

Komponen pokok rencana pengamanan kebakaran mencakup rencana pemeliharaan sistem proteksi kebakaran, rencana ketagrahan yang baik dan rencana tindakan darurat kebakaran (Kementerian PURI, 2009)

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan

Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a) Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi
- c) Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya,

Siswanto (2012 : 21)

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Indikator	Lokasi
1	I Putu Dharmanu Yudartha (p.dharmanu@gmail.com 2)	Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung)	Pengukuran kinerja menurut Mahsun, (2006:31). Beliau memaparkan bahwa organisasi publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat finansial dan tingkat efisiensi.	1. Masukan (<i>input</i>) 2. Proses (<i>process</i>) 3. Keluaran (<i>output</i>) 4. Hasil (<i>outcomes</i>) 5. Manfaat (<i>benefit</i>) 6. Dampak (<i>impact</i>)	Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten bandung
2	Feny Islamiati (fenyislamiati94@gmail.com)	Fungsi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya	Teori Fungsi Manifes dan Fungsi Laten oleh Robert Merton digunakan dalam menganalisis data. Menurut Robert K. Merton melalui teori fungsi manifes bahwasannya fungsi tersebut memberikan objektif dalam menyesuaikan atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan sistem tersebut (Kaplan & Manners, 1999, p.79). Artinya, kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya secara umum yang beredar di masyarakat mempunyai tugas memadamkan api dan menyelamatkan korban bencana kebakaran ketika terjadi bencana kebakaran. Fungsi laten dalam teori Robert K. Merton menjelaskan fungsi ini tidak dikehendaki maupun disadari oleh warga masyarakat.	1. Penyelamatan 2. Penjagaan 3. Pencegahan 4. Pelatihan 5. sosialisasi	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya
3	Carolina Lita Permatasari (162015005@stude	Penggunaan Keselamatan Kerja dalam Menunjang Kesejahteraan Karyawan Pemadam	Menurut Hasibuan (2001: 184) menyatakan bahwa, layanan kesejahteraan yang dilaksanakan yaitu suatu kebutuhan material dan nonmaterial yang bersifat ekonomis, yang dapat dilihat	1. Keselamatan kerja 2. Kesejahteraan karyawan	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

	nt.uksw.edu)	Kebakaran di Kantor Satpol PP	dari pemberian fasilitas dan pelayanan.		PP) di Salah tiga
4	Sofyul Hidayat dan Irwan Nasution (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (2) (2013): 176-191)	Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah	Menurut Kepmen PAN No.25 tahun2004, ada beberapa dimensi yang menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelayanan 2. Persyaratan pelayanan 3. Kejelasan petugas pelayanan 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 5. Tanggung jawab petugas pelayanan 6. kemampuan petugas pelayanan 7. kecepatan pelayanan 8. Keadilan pelayanan 9. Kesopanan petugas pelayanan 10. Kewajaran biaya pelayanan 11. Kepastian biaya pelayanan 12. Kepastian jadwal pelayanan 13. Kenyamanan lingkungan 14. Keamanan pelayanan 	kabupaten Deli Serdang

C. Kerangka Pikiran

Gambar 2.1. Kerangka pikir penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan kebakaran



D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan ini, diantaranya :

1. Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu ditutrukan dalam suatu program dan proyek
2. Penanganan awal terhadap kejadian pemadaman kebakaran yang mana di lapangan di ketahui petugas pemadam kebakaran datang selalu lambat sehingga kebakaran menjadi semakin besar untuk di tangani
3. Tahap Pemberangkatan Awal
 - a. Informasi kejadian kebakaran dapat diterima antara lain dari petugas Kantor Pemadam Kebakaran yang melihat sendiri kejadian, laporan dari masyarakat langsung, dari instansi lain atau media cetak dan elektronik.
 - b. Dalam hal informasi kejadian kebakaran tersebut oleh petugas piket, hal yang perlu diketahui adalah nama penelepon, alamat bangunan atau gedung yang terbakar, fungsi atau peruntukan bangunan, jam kejadian dan titik kenal.
 - c. Setiap petugas pada tiap pos harus memperhatikan dan mematuhi segala perintah Komandan pengerahan mobil pemadam kebakaran menuju tempat kejadian kebakaran.
 - d. Pengerahan mobil kebakaran tersebut meliputi satu unit mobil pompa, satu unit mobil submersible pump (pumper) dan mobil rescue. Pengerahan mobil pemadam tersebut harus dari pos pembantu terdekat dari kejadian kebakaran.
 - e. Waktu tanggap (*respon time*) terhadap memberitahukan sampai pelayanan pemadam kebakran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri dari; pertama, waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 (lima) menit. Kedua, waktu

perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi kebakaran selama 5 (lima) menit. Ketiga, waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5(lima) menit.

4. Tahap Pemberangkatan Lanjutan

- a. Apabila dipertimbangkan tindakan pemadami mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air atau kemampuan teknis lain, maka komandan plenton/regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada pos induk.
- b. Pengerahan bantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan bantuan dari komandan peleton/regu dari unit pemadaman yang tiba pertama kali di tempat kejadian kebakaran.
- c. Bantuan unit pemadam kebakaran tersebut harus dikerahkan sesuai kebutuhan dari pos pembantu terdekat kejadian kebakaran.

5. Tahap Operasional Pemadaman

Operasi pemadaman dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu:

- a. *Size up*, yaitu menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung.
- b. *Lacote*, yaitu melokalisir api agar tidak menjalar keberbagai tempat.
- c. *Confine*. yaitu mencari sumber api saat pemadaman berlangsung.
- d. *Extinguish*, yaitu melakukan tindakan pemadaman api.
- e. Dalam melakukan operasi pemadaman, petugas pemadaman berkewajiban berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran, mengenakan perlengkapan perlindungan perorangan sesuai standar dan memperhatikan taktik dan strategi pemadaman.

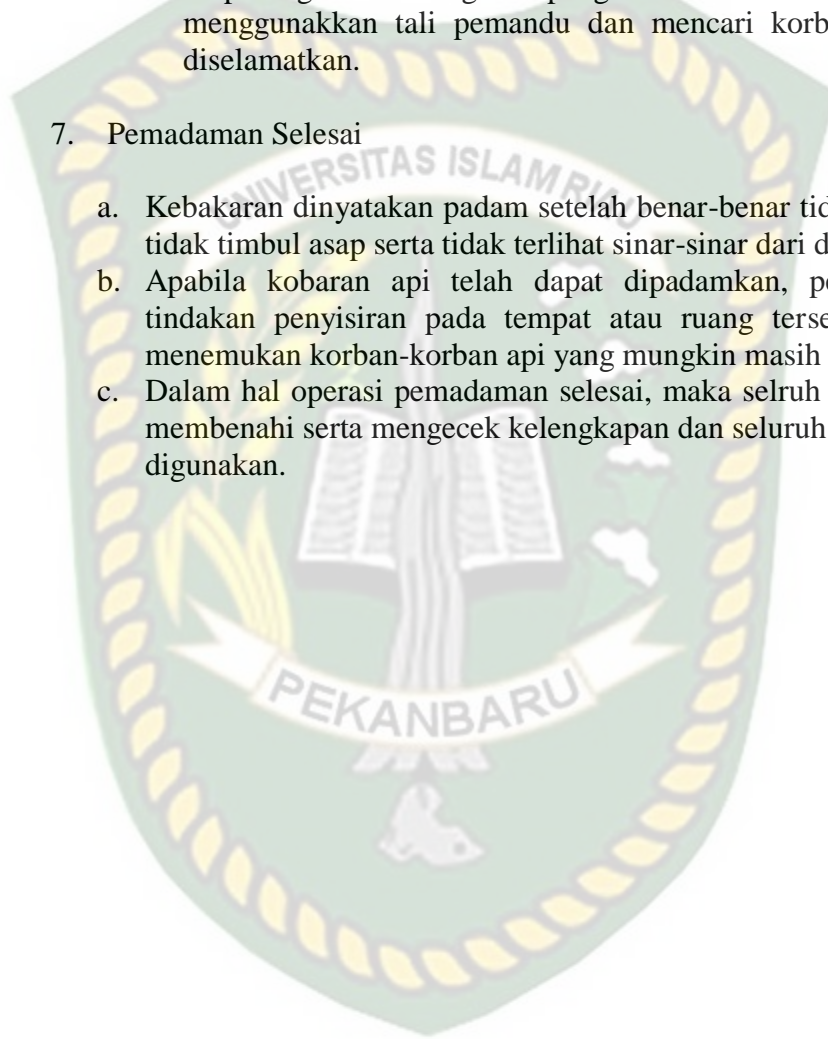
6. Tahap Penyelamatan

- a. Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi dilokasi kebakaran.
- b. Operasi penyelamatan tersebut dilakukan dengan cara mencegah penyebaran api dan menemukan orang-orang yang terperangkap dalam bangunan terbakar.

- c. Dalam melakukan tindakan penyelamatan, regu penyelamat berkewajiban mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan, mengenakan perlengkapan pelindung perorangan yang sesuai setandar, masuk lokasi sekurang-kurangnya 2 orang berpasangan dan dengan sepengetahuan komandan pleton/regu, menggunakan tali pemandu dan mencari korban yang perlu diselamatkan.

7. Pemadaman Selesai

- a. Kebakaran dinyatakan padam setelah benar-benar tidak ada api dan tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar-sinar dari bara api.
- b. Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan penyisiran pada tempat atau ruang tersembunyi untuk menemukan korban-korban api yang mungkin masih menyala.
- c. Dalam hal operasi pemadaman selesai, maka seluruh petugas segera membenahi serta mengecek kelengkapan dan seluruh peralatan yang digunakan.



E. Operasional variabel

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu ditutrukan dalam suatu program dan proyek (siswanto 2009)	Pelaksanaan Tugas	Tahap Pemberangkatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi kejadian kebakaran dapat diterima antara lain dari petugas Kantor Pemadam Kebakaran yang melihat sendiri kejadian, laporan dari masyarakat langsung, dari instansi lain atau media cetak dan elektronik. b. Dalam hal informasi kejadian kebakaran tersebut oleh petugas piket, c. Setiap petugas pada tiap pos harus memperhatikan dan mematuhi segala perintah Komandan d. Pengerahan mobil kebakaran tersebut meliputi satu unit mobil pompa, satu unit mobil submersible pump (pumper) dan mobil rescue. e. Waktu tanggap (<i>respon time</i>) terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadam kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri dari; pertama, waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan

		Tahap Pemberangkatan Lanjutan	<p>penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 (lima) menit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila dipertimbangkan tindakan pemadami mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air atau kemampuan teknis lain, maka komandan plenton/regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada pos induk. Pengerahan bantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan bantuan dari komandan peleton/regu dari unit pemadaman yang tiba pertama kali di tempat kejadian kebakaran. Bantuan unit pemadam kebakaran tersebut harus dikerahkan sesuai kebutuhan dari pos pembantu terdekat kejadian kebakaran
		Tahap Operasional Pemadaman	<ol style="list-style-type: none"> <i>Size up</i>, yaitu menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung. <i>Lacote</i>, yaitu melokalisir api agar tidak menjalar keberbagai tempat. <i>Confine</i>. yaitu mencari sumber api saat pemadaman berlangsung. <i>Extinguish</i>, yaitu melakukan tindakan pemadaman api

		Tahap Penyelamatan	<p>a. Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi dilokasi kebakaran.</p> <p>b. Operasi penyelamatan tersebut dilakukan dengan cara mencegah penyebaran api dan menemukan orang-orang yang terperangkap dalam bangunan terbakar</p> <p>c. Dalam melakukan tindakan penyelamatan, regu penyelamat berkewajiban mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan, mengenakan perlengkapan pelindung perorangan yang sesuai setandar, masuk lokasi sekurang-kurangnya 2 orang berpasangan dan dengan sepengetahuan komandan pleton/regu, menggunakan tali pemandu dan mencari korban yang perlu diselamatkan</p>
		Pemadaman Selesai	<p>a. Kebakaran dinyatakan padam setelah benar-benar tidak ada api dan tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar-sinar dari dara api.</p> <p>b. Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan penysisiran pada tempat atau ruang tersembunyi</p>

			<p>untuk menemukan korban-korban api yang mungkin masih menyala.</p> <p>c. Dalam hal operasi pemadaman selesai, maka seluruh petugas segera membenahi serta mengecek kelengkapan dan seluruh peralatan yang digunakan</p>
--	--	--	---

Sumber : *Modifikasi Penelitian 2019*



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Mengacu dari rumusan penelitian, bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan setiap indikator. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan : Tipe Survey Deskriptif yaitu pengumpulan data dengan jalan menggunakan wawancara dan serta menguraikan setiap hasil wawancara tersebut dengan jenis kuanlitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan hal ini dikarenakan masih terlihat Kebijakan Pemerintah dalam menanganikebakaran yang belum optimal di lakukan.

C. Informan dan Key Informan

Informan dalam penelitian ini adalah yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan ditambah dengan masyarakat untuk jelasnya mengenai populasi sampel ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1. Jumlah Informan

No	Unit	Sampel
1	Kepala Satuan Polisi PP dan Damkar	1
2	Kasi Pencegahan	1
3	Pegawai Damkar	21
4	Masyarakat terkena bencana	5
	Jumlah	28

Sumber :Data Lapangan2019

Untuk Kepala satuan digunakan teknik sensus karena jumlahnya sedikit dan untuk pegawai digunakan Purposive random sampling yang mana jumlahnya cukup banyak dan untuk masyarakat digunakan teknik acak sederhana karena jumlahnya banyak dan jauh lokasinya.

Untuk Key Informan bagi aparat pemerintah yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kasi Pencegahan di gunakan cara teknik sensus dikarenakan jumlahnya sedikit dan dapat ditemui sewaktu-waktu sedangkan.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer, yaitu :

Data yang diperoleh secara langsung dari responden meliputi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kendala-kendala yang dihadapinya.

b. Data Sekunder yaitu :

Data yang diperoleh dengan jalan langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran seperti

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan pelayanan publik
- b. Fungsi dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan
- c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas.
- b. Observasi ialah melakukan peninjauan ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan buku dan bahan yang mendukung penelitian.

F. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, lalu dikelompokkan selanjutnya di persentasikan untuk dianalisa secara diskriptif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat dan dari buku- serta dokumen yang ada dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

G. Jadwal waktu penelitian

Tabel III.2. Jadwal Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan 2019															
		Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisa Data																
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (UP)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Pelalawan termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran [Kabupaten Kampar](#), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni:Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Langgam, dengan ibu kota Langgam
2. Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan ibu kota Sei Kijang
3. Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci

4. Kecamatan Bunut, dengan ibu kota Pangkalan Bunut
5. Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan ibu kota Sorek Satu
6. Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan ibu kota Pangkalan Lesung
7. Kecamatan Pelalawan, dengan ibu kota Pelalawan
8. Kecamatan Bandar Petalangan, dengan ibu kota Rawang Empat
9. Kecamatan Ukui, dengan ibukota, dengan ibu kota Ukui Satu
10. Kecamatan Kerumutan, dengan ibu kota Kerumutan
11. Kecamatan Kuala Kampar, dengan ibu kota Teluk Dalam
12. Kecamatan Teluk Meranti, dengan ibu kota Teluk Meranti

Kabupaten Pelalawan terletak pada posisi geografis antara $00^{\circ} 48' 32''$ Lintang Utara – $00^{\circ} 24' 14''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 30' 40''$ – $103^{\circ} 23' 22''$ Bujur Timur. Dengan batas wilayah adalah :

- ✚ Sebelah utara : Kabupaten Siak dan perairan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- ✚ Sebelah timur : Perairan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- ✚ Sebelah selatan : Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- ✚ Sebelah barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pelalawan berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh

aliran [Sungai Kampar](#), serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri.

Struktur wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2013 adalah 356.945 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 188.013 jiwa dan perempuan 168.932 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 90.306 jiwa dan terendah di Bunut 13.742 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pada satu wilayah dan periode tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2013 cukup tinggi 6,71 persen. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan tingkat kelahiran yang tinggi juga karena tingginya jumlah pendatang dari luar wilayah Pelalawan terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan dan perkebunan.

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang atau jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan Persamaan Bunga Berganda (Metode Geometrik), dengan Rumusan $P_t = P_o (1+r)^n$. Tabel berikut akan menyajikan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan 5 tahun yang akan datang, dengan asumsi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,8 % per tahun.

Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran - kematian dan masuk - keluar.

B. Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan

Adapun visi kabupaten Pelalawandengan kepemimpinan oleh Bupati Annas Ma'mun adalah “Terwujudnya Pelalawanyang maju, sejahtera dan berdaya saing tahun 2016” dengan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
3. Memajukan sektor pertanian, industri dan jasa Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih dan berwibawa Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa.

C. Profil SKPD Kabupaten Pelalawan

Selanjutnya terdapat beberapa dinas dan Dinas dan Kantor di Kabupaten Pelalawanyang berdasarkan Perda No 35 tahun 2009 antara lain :

- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Kesehatan
- Dinas kehutanan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Pariwisata
- Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- Bappeda
- Badan Penanaman Modan dan Investasi
- Kantor Pelayanan Terpadu
- Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

Pada dasarnya sesuai dengan catatan sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas yang cukup luas, yaitu dibidang pemerintahan umum, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran juga

aktif dalam melakukan antisipasi terhadap kebakaran gedung maupun hutan pada daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, pembentukannya seiring dengan meningkatnya bencana kebakran di Kabupaten Pelalawankhususnya di kecamatan Pangkalan Kuras,Sorek.Saat itu keberadaan Pemadam Kebakaran masih berbentuk Unit bagian dari sekrateriat daerah, yang dibawah bagian pemerintahan, tetapi masih dengan sebutan Barisan Pemadam Kebakaran.

Setelah itu pada tahun 2000, maka pemadam kebakaran menjadi unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan seorang kepala kantor yang menduduki Jabatan Eselon II.b. Seperti disinggung sebelumnya, secara organisasi dan struktural Pemadam Kebakaran Kabupaten PelalawanTergabung dalam unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalannya juga termasuk satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.

Kondisi barisan pemadam kebakaran pada saat itu hanya didukung dengan sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran dan personil yang masih minim sekali dan ditambah dengan sulitnya air sehingga setiap kebakaran petugas sulit untuk memadamkan api tetapi petugas pemadam kebakaran mendapat bantuan dari masyarakat setempat dengan menggunakan air seadanya. Pada tahun 1999 – 2001 dimana tingkat kebakaran di Kabupaten Pelalawancukup tinggi terutama di Kecamatan Pangkalan Kuras,Sorek.Karena seringnya mengalami musibah kebakaran, daerah itu di juluki dengan sebutan Sorek.Sehingga untuk menanggulagi bahaya

kebakaran ini, maka Bupati Pelalawan mengambil langkah-langkah untuk mendidik atau melatih 8 orang untuk dijadikan kader-kader pemadam kebakaran. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di Kota Pekanbaru yang berlangsung selama 1 bulan baik teori maupun praktek langsung di lapangan. Apa lagi pada saat itu Barisan Pemadam Kebakaran masih bergabung dengan polisi pamong praja Kabupaten Pelalawan jadi dalam pembagian tugas belum berjalan efektif, dan banyak masyarakat Kabupaten Pelalawan beranggapan bahwa Pemadam Kebakaran itu, Polisi Pamong Praja, karena mereka masih bergabung dalam satu kantor dan tugasnya mereka belum berjalan dengan efektif.

Selanjutnya, petugas Pemadam Kebakaran yang telah dilatih tersebut diserahkan kembali kepada Bupati Pelalawan untuk ditugaskan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Maka dengan demikian pada saat ini terdapat satu instansi yang menangani masalah penanggulangan kebakaran yaitu.

- *Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.*

Kemudian pada tahun 2004 Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan diberi kesempatan 5 orang pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Propinsi Riau Hasan Basri untuk mengikuti latihan bersama dalam menanggulangi kebakaran di Kota Pekanbaru dan latihan bersama itu berlangsung selama 2 minggu. Dalam meningkatkan pelayanan maka Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan selalu mengirim

anggotanya untuk berlatih dan menimba ilmu di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

Armada yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2015 antara lain dapat dilihat pada table dibawah ini. :

Table IV.1 Armada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No	Jenis armada	Jumlah
1	Mobil pompa kebakaran jenis jeep Nissan potrol	1 unit
2	Tank truck kebakaran jenis isuzu kapasitas 300 liter air	1 unit
3	Pompa portable Godvida	2 unit

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan 2019

Melihat jumlah personil yang ada didukung oleh armada yang dimiliki pada waktu itu, maka pada tahun 2006 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan berpisah dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, dimana Polisi Pamong Praja pada saat ini berdiri sendiri dan memiliki tugasnya sendiri, mereka berkantor di komplek perkantoran batu 6 (enam), sementara itu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran bergabung dengan Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) tetapi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sudah berdiri sendiri serta sudah memiliki tugasnya masing – masing, meskipun masih bergabung dengan Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindung Masyarakat, Satuan Polisi Pamong

Praja Dan Pemadam Kebakaran sudah memiliki tugas dan struktur organisasi sendiri meskipun struktur organisasi pemadam kebakaran itu belum tersusun dengan baik.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ini terus mengalami kemajuan dan penyempurnaan baik dari segi personil maupun armada yang dimiliki. Pada tahun 2002 sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Kabid Linmas H. Zisriady, SE, M. Si, dimana pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran memiliki 80 pegawai termasuk Kabid Linmas, yang memiliki 75 pegawai operasional yang turun langsung kelapangan dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran di Kabupaten Pelalawan. Dalam mengatasi dan menanggulangi kebakaran maka tenaga operasional selalu siaga penuh selama 24 jam di atas 2 regu secara bergiliran yaitu :

1. Masuk pagi dimulai dari jam 07.30 sampai dengan 19.30
2. Masuk malam dimulai dari jam 19.30 sampai dengan 07.30

Pada tahun 2006 tercatat jumlah pegawai atau anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan berjumlah 42 orang, sampai tahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 80 orang yaitu berdasar di dua lokasi yang berbeda 30 orang anggota Pemadam Kebakaran berada di Kecamatan Langgam dan 50 orang anggota Pemadam Kebakaran termasuk kabid Limasnya berada di kecamatan Pangkalan Kuras, Sorek. Dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan gedung serta tingginya angka kebakaran, menyebabkan jumlah pegawai masih dianggap kurang.

Sejak tahun 2010 sampai saat sekarang ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan selalu melakukan pelatihan dan penyuluhan itu semua dilakukan semata-mata untuk menyempurnakan Kinerja Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2010 atas biaya APBD Pelalawan dilakukan Sosialisasi Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pelatihan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan digelar di gedung serbaguna SMP Negeri 1. Acara tersebut dibuka oleh kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pelalawan Ahmad Kurnia. Sekitar enam puluh peserta dari berbagai unsur lapisan masyarakat menghadiri pelatihan tersebut. Dimana sosialisasi Pemadam Kebakaran itu berlangsung selama 1 minggu dan sosialisasi kebakaran itu di pimpin oleh Ka. Bakesbangpolinmas Ahmad Kurnia, Kabid pemadaman dan penanggulangan bencana Dinas pemadaman kebakaran Pekanbaru Drs Zul Azmi, H. Zisriady dan Gamal Abdul Naser, SH, Msi, MH. Dimana pelatihan ini berlangsung selama 1 minggu dan bertujuan untuk melatih para petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam penanggulangan kebakaran, setelah selesai pelatihan ini maka petugas pemadam kebakaran akan bertugas kembali sesuai dengan tugasnya masing – masing.

Kemudian Pada tanggal 11 november 2011, 40 Petugas pemadaman kebakaran Pelalawan mengikuti pelatihan reaksi cepat penanggulangan kebakaran Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan sub bidang pelatihan reaksi cepat anggota pemadam kebakaran digelar dilantai VI Hotel Kusuma

jalan Riau Pangkalan kerinci, Dalam acara pelatihan ini dikerahkan lebih kurang 40 anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawandari Sorek maupun dari Pangkalan kerinci ikut serta pelatihan selama dua hari. Pelatihan ini agar dapat diimplementasikan oleh petugas pemadam kebakaran dengan baik, bagus, cepat dan dapat mengatasi peristiwa kebakaran. Pelatihan ini di pimpin oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Pengendalian Masyarakat (Linmas) Kabupaten Pelalawan, Muhammad Syukur Rambah.

Dimana setia petugas pemadam kebakaran yang ikut dalam pelatihan ini akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang cara cepat dalam mengatasi musibah kebakaran, meskipun pelatihan ini Cuma dua hari tapi diharapkan petugas Pemadam Kebakaran paham akan cara-cara pemadaman api yg benar dan efektif. Setelah dilakukan pelatihan selama 2 hari maka semua petugas yang ikut latihan akan diserahkan lagi kekantornya masing- masing untuk menjalankan tugasnya.

Dengan seringnya dilakukan pelatihan terhadap petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, diharapkan semua petugas Pemadam Kebakaran mampu mengatasi permasalahan kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Pelalawankhususnya di Kecamatan Pangkalan Kuras,Sorek. Meskipun tidak didukung dengan prasarana yang lengkap namun dengan adanya pelatihan ini akan menambah wawasan petugas pemadam kebakaran dalam nenggulangi setiap musibah kebakaran.

Pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada table berikut .

Table IV.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor dan garasi	1 Unit
2	Mobil Pemadam Kebakaran	4 Unit
3	Pos pemantu pemadam kebakaran	3 Pos
4	Waduk/bak	1 Buah
5	Selang kebakaran	10 Buah
6	Baju anti api	4 Set
7	Baju anti panas	4 Set
8	Tabung oksigen	2 Buah
9	Racun api tabung kering	4 Buah
10	Mesin pompa portable 2 buah	2 Buah

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, 2019

E. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Adalah unsur pelaksanaan kota dalam usaha dan kegiatan menanggulangi dan pencegahan kebakaran secara maksimal dalam daerah.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang sepenuhnya dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubit Pemadam Kebakaran

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran.

Selain tugas pokok yang dimaksudkan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berkewajiban pula melakukan tugas-tugasnya yang meliputi :

1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
2. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengelola data-data dan bahan mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
3. Membuat rancangan - rancangan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
4. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan sarana – sarana atau pertimbangan – pertimbangan tepat pada waktunya kepada Bupati sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
5. Memberikan Saran dan pendapat kepada Bupati dalam melaksanakan tugas pokok.
6. Mengolah kebijakan tentang pemungutan restribusi daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

7. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau kebijaksanaan dibidang pungutan retribusi daerah.
8. Mempersiapkan atau menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan daerah.

b. Fungsi

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi dalam melayani masyarakat dalam bidang perizinan/rekomendasi pengawasan bangunan dalam hal pencegahan kebakaran dan menggali pendapatan asli daerah pungutan retribusi.

Dari tugas pokok dan fungsinya di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan memiliki visi dan misi berikut :

Visi : Terwujudnya profesionalisme dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warga Kabupaten Pelalawan dari bencana kebakaran.

Misi :

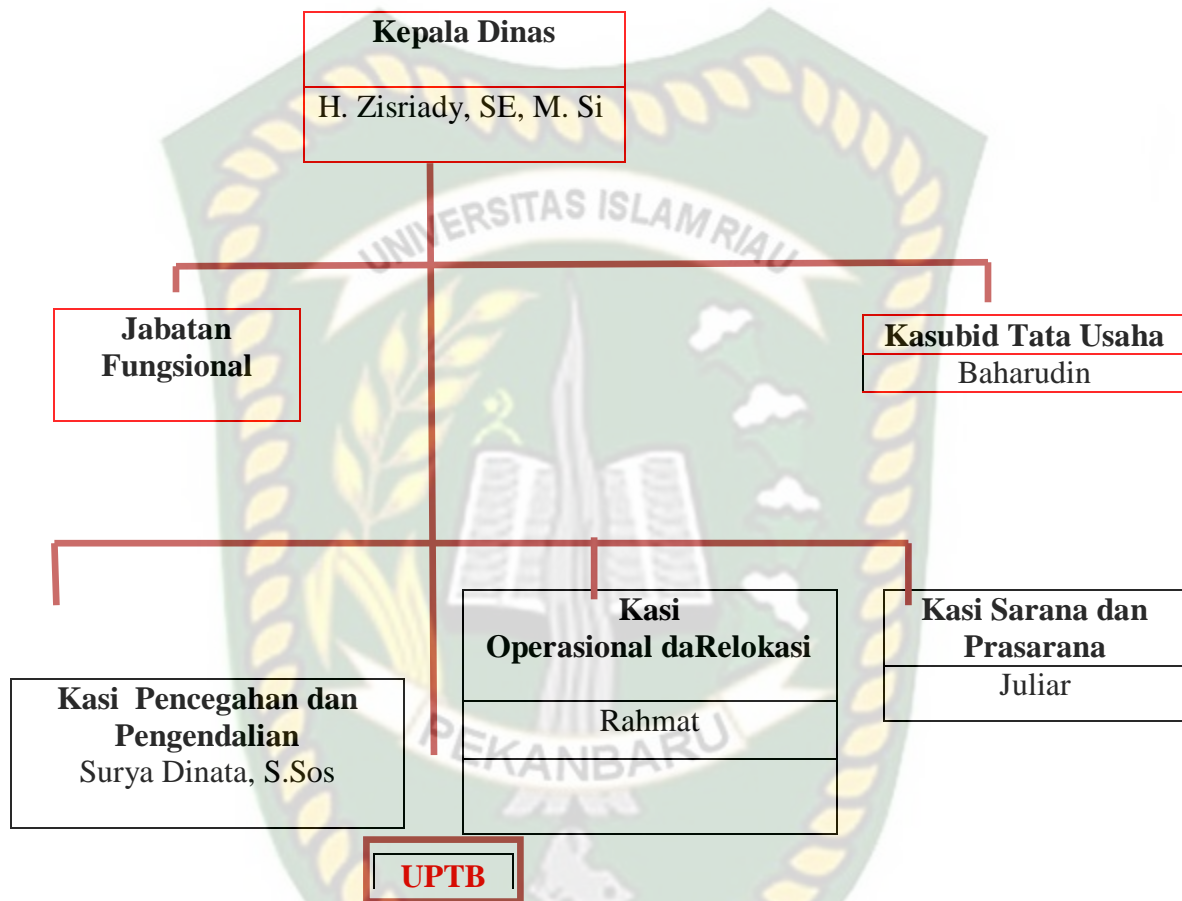
- a. Terselenggaranya organisasi pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan sesuai Undang – Undang dan peraturan yang berlaku dan perizinan bangunan dibidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran.
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk mencegah terjadinya kebakaran.

- c. Terpenuhi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta terwujudnya pendirian pos pembantu pemadam kebakaran disetiap kecamatan.
- d. Tercapainya profesionalisme petugas pemadam kebakaran kabupaten Pelalawan.

3. Struktur Organisasi

Dalam setiap pemerintah baik pemerintahan maupun swasta dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya harus ada struktur organisasinya yang dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana hubungan kegiatan dan tugas – tugas antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi yang baik dapat menemukan pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan pada siapa ia harus bertanggung jawab. Disini terlihat dengan jelas koordinasi antar bagian atau seksi, gunanya pengendalian pegawai dengan pekerjaannya masing – masing agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencapai organisasi.

**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pelalawan
pada tahun 2019.**



Dari struktur Organisasi tersebut dapat dilihat bahwa organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan terdiri dari tiga unsur :

1. Unsur Pimpinan, dipegang oleh satu orang pegawai yaitu Kepala Dinas (kepala kantor).
2. Unsur pembantu pimpinan, terdiri dari 1 orang yaitu sub.bidang.

3. Unsur pelaksana, yaitu kasi – kasi dan pelaksanaan teknis Dinas atau pegawai operasinal yang terdiri dari 75 orang pegawai.

Adapun Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KabupatenPelalawan:

- a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kasi Pencegahan dan Pengendalian
 - d. Kasi Operasional dan Relokasi
 - e. Kasi Sarana dan Prasarana
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
4. Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Dalam menyelenggarakan aktifitas dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KabupatenPelalawan meliputi :

- a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas daerah maupun instansi – instansi lain diluar dinas daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala sub Bagian Tata Usaha dan kasi harus menerapkan prinsip– prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.

Dengan Demikian Kepala Kantor, kepala sub Bagian Tata Usaha, kepala kasi tanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada

bawahannya serta melaporkan hasil – hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatan masing – masing.

5. Pembagian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2007 pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta Keputusan Bupati Pelalawan No. 10 Tahun 2007 mengenai uraian Dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang meliputi :

a. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Bupati dalam kegiatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Pelalawan
- b. Melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas/kabid Linmas harus menciptakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan implikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi lain diluar dinas daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi segala kegiatan – kegiatan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi sesuai dengan tugas pokok menurut ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
- e. Memberi informasi mengenai situasi setiap kejadian kebakaran, saran dan atau pertimbangan – pertimbangan baik diminta atau tidak oleh bupati sebagai bahan untuk mendapatkan kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya.
- f. Mempersiapkan bahan bagi pengangkatan pembentukan serta penetapan dan tugas kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan sebagai bahan keterangan pertanggung jawaban tugas – tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran .

- h. Mempertanggung jawabkan tugas–tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kepada Bupati.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bidang tata usaha dipimpin oleh seseorang kepala sub Bidang Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran .

Dalam menjalankan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum kantor.
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat.
- d. Melaksanakan analisis dan penyajian data bidang pemadam kebakaran.
- e. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pemadam kebakaran.
- f. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan Dinas, rencana kegiatan dan anggaran kantor.
- g. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kantor.
- h. Menyusun ketatalaksanaan perogram dan kegiatan kantor.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kantor.
- j. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kantor.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
- l. Melaksanakan monitoring, evaluateasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

c. Kasi Pencegahan dan Pengendalian

Kasi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran serta

mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pengawasan, penelitian dan penilaian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menjalankan tugas, kasi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi

- a. Menyusun rencana kegiatan kasi Pencegahan dan Pengendalian
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- e. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran.
- f. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat.
- g. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

d. Kasi Operasional

Kasi Operasional mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas di bidang operasional pemadam kebakaran, merumuskan dan melaksanakan penanggulangan dan pemadaman serta pertolongan pertama pada kecelakaan kebakaran.

Dalam menjalankan tugas, kasi Operasional mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kasi Operasional.
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran.
- f. Melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- g. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

e. Kasi Sarana dan Prasarana

Kasi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran selain itu juga mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan kegiatan di bidang pengadaan, memelihara sarana dan prasarana pencegahan dan peendalian pemadam kebakaran serta penelitian.

Dalam menjalankan tugas, kasi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kasi Sarana dan Prasarana.
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- d. Menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana kebakaran.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTB)

Adapun tugas – tugas dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah :

1. Seksi Mobil/Sopir

- a. Seksi Mobil/Sopir dipimpin oleh tenaga kepala seksi/supir yang mempunyai tugas dan wewenang dan bertanggung jawab kepada Kasubit dalam pelaksanaan pengelolaan. Mobil armada pemadam kebakaran termasuk para supir operasional.
- b. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut kepala seksi Mobil/Supir mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
 - b) Mensiap-siagakan seluruh unit mobil pemadam kebakaran dan supir serta petugas operasional pemadam kebakaran.
 - c) Menjaga, memperhatikan kebutuhan logistic dan perawatan mobil unit pemadam kebakaran berikut dengan prasarananya.

- d) Melakukan uji coba secara berkala terhadap mobil dan mesin pompa Unit Pemadam Kebakar.
- e) Menjaga atau merawat dan menginventarisir seluruh barang atau peralatan penanggulangan yang ada pada mobil dan mesin pompa berikut kelengkapannya
- f) Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan kepada supir dan petugas operasional dalam penanggulangan kebakaran
- g) Menyiapkan petunjuk operasional mobil pemadam kebakaran pada setiap kejadian kebakaran.
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kasubit Pemadam Kebakaran.

2. Komandan Operasional

Konamdan Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam siaga untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran. Berdasarkan petunjuk atau kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Komandan Operasional memimpin ketua regu bidang operasi dan siaga dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan operasi pemadam kebakaran
- b. Menyelenggaraan penilaian terhadap kelayakan bangunan dan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran
- c. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh tenaga lain, seperti tenaga sukarelawan
- d. Melaksanakan tugas – tugas penyelamatan jiwa harta benda dan memberi pertolongan pertama pada korban kecelakaan kebakaran
- e. Memjalin kerjasama dengan instansi lain dalam penanggulangan kebakaran, mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan.
- f. Mengidentifikasi setiap kejadian kebakaran dan membuat laporan.
- g. Mengklarifikasi kelayakan sarana operasional dan penanggulangan kebakaran dan bencana.
- h. Memberi saran atau masukan hasil operasi penanggulangan yang dicapai.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor Kabupaten Pelalawan.

Tetapi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KabupatenPelalawan, Unit Pelaksana Teknis Dinas belum tercantum secara optimal. Pelaksanaan tugas dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dilaksanakan oleh Bidang pemadam dan Penanggulangan Bencana.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menganalisa tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi kebakaran di Kabupaten Pelalawan, dimana penelitian ini mengambil fokus kepada satu variable tunggal yaitu Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran .Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu tehnik menganalisa data dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti.Setelah data didapat kemudian dianalisa secara diskriptif, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Kebakaran di Kabupaten Pelalawandianalisis dengan menggunakan teori dari Huseini.

A. Identitas Responden

1. Responden masyarakat dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawanberdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.1Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki – Laki	20	97,5 %
2	Perempuan	8	2,5 %
	Jumlah	28	100

Sumber data :Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, 2019

Dari Tabel V.1, diketahui bahwa jumlah masyarakat pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawanberjumlah 28 orang

dengan jumlah pegawai laki – laki sebanyak 20 orang atau dengan persentase sebanyak 98,00 persen sedangkan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang dengan persentasenya sebesar 2,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan lebih didominasi oleh Laki – laki

2. Responden masyarakat dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan berdasarkan pendidikan formal.

Tabel V.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Strata- 1 (S1)	12	2,5 %
2	SLTA Sederajat	16	97,5 %
	Jumlah	28	100 %

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat dan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, yang terbanyak adalah pegawai yang memiliki pendidikan SLTA sederajat yaitu sebanyak 16 orang atau dengan persentase sebesar 97,5 persen dari 28 orang jumlah pegawai yang ada. Sedangkan pegawai dengan pendidikan strata- 1 (S1) sebanyak 12 orang atau dengan persentase sebesar 2,5 persen.

B. Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan kebakaran

Kemudian dalam usaha pencegahan kebakaran di Kabupaten Pelalawan, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan memiliki

program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencegah atau meminimalisir resiko kebakaran, dengan melalui berbagai proses yaitu :

1. Tahap Pemberangkatan awal

Dengan melakukan Penyuluhan/Sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk mengatasi bahaya kebakaran.

Berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di perkotaan penyuluhan/sosialisasi dan edukasi tersebut dalam bentuk :

- a. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan edukasi pencegahan resiko kebakaran.
- b. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan edukasi prosedur keadaan darurat kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
- c. Keadaan penyuluhan/sosialisasi dan edukasi pencegahan resiko kebakaran serta prosedur keadaan darurat sedikitnya diadakan 2 kali dalam setahun.

Dimana pada saat ini Kabupaten Pelalawannya memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran, yang semua itu masih di anggap kurang dibandingkan tingkat kebakaran di Kabupaten Pelalawanya yang tinggi, membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan dalam menanggulangi kebakaran yang suatasaat terjadi.

Jumlah sumberdaya manusia ikut mempengaruhi kualitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran , kekurangan sumberdaya manusia membuat banyak pekerjaan menjadi terhambat sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal, selain jumlah sumberdaya yang kurang memadai, kualitas dari

sumberdaya itu sendiri juga mempengaruhi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Karena sumberdaya manusia merupakan penggerak atau pelaksana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Faktor sumber daya ini meliputi jumlah sumber daya manusia yang ada, tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi ini. Di mana pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan masih kurang akan sumberdaya manusianya, khususnya danru (Komandan regu) dan Petugas Operasional Lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Mengenai Sumberdaya Manusia yang ada.?

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai sumberdaya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan:

Hasil wawancara: y kalau ditanya tentang SDM saat ini masih kurang. Karna masih minimnya anggota operasional lapangan, jika dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Pelalawan ini. Yang mana jumlah petugas operasional saat ini hanya berjumlah 75 orang, seharusnya berjumlah 150 orang itu pun dianggap masih kurang dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Pelalawan dengan tingkat kebakaran yang tinggi. (wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 22 Agustus 2019)

Berikut kutipan wawancara dengan komandan Kasi Pencegahan dan Pengendalian, tentang keahlian dan pengetahuan petugas operasional lapangan dalam penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Pelalawan:

Hasil wawancara: setiap petugas itu berbeda-beda kemampuannya ada yg sudah paham tentang pemadaman yang benar dan ada yang masih kurang .karena tidak semua petugas dapat latihan dan pendidikan diluar, karena setiap pelatihan diambil atau di wakikan 4 atau 6 orang petugas Operasional Pemadam Kebakaran Pelalawan, jadi tidak semua petugas itu memiliki kemampuannya sama.(wawancara dengan Kasi Pencegahan dan pengendalian Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Agustus 2019)

Berikut kutipan wawancara dengan Petugas Operasional Lapangan mengenai pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Pelalawan

Hasil wawancara : pembinaan ada, tapi jarang sekali diadakan. selama saya menjadi anggota pemadam kebakaran, saya baru sekali mengikuti pembinaan ,itu pun berbentuk pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan di gedung sekolah SMA N 1 Sorek. Jadi kami belum pernah memdapatkan pembinaan yang sifatnya seperti itu. (wawancara dengan Petugas Operasional Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa keadaan sumberdaya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan baik pegawai operasional maupun pegawai staf sekalipun masih kurang dari yang dibutuhkan, ditambah lagi banyak petugas operasional lapangan belum memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai dalam penanggulangan dan pencegahan kebakran. Hal ini karena masih kurangnya pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan khusus mengenai penanggulangan dan pencegahan kebakaran pada semua petugas pemadam kebakaran.

Sedangkan untuk daerah Pangkalan Kuras dan Kerinci Kanan diditerangkannya penanggulangan kebakaran dengan mendirikan bak penampungan air serta unit pompa pemadaman kebakarannya. Hal ini tentunya persediaan air dengan sumur bor.

“Sebetulnya sangat kekurangan tetapi kita sudah usulkan untuk daerah Pangkalan Kuras dan Kerinci Kanan mobil tangki air beserta pompanya. Hal ini kita usulkan untuk anggaran tahun depan,”pungkasnya. (*andi wrc*)

Berdasarkan kutipan berita diatas diketahui bahwa saat ini Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawansangat minim sarana dan prasarana. Sarana yang paling utama dibutuhkan dalam penanggulangan bencana kebakaran adalah mobil pemadam kebakaran. Jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawansaat ini bisa dikatakan sangat kurang.berdasarkan Kepmen PU No. 11/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di perkotaan, rasio perbandingan antarajumlah penduduk dengan jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk 40.000 jiwa.

2. Tahap Pemberangkatan Lanjutan

Hasil yang dicapai terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai, produktifitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KabupatenPelalawanadalah dalam penanggulangan kebakaran yaitu kegiatan protuksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa serta luka-luka, dan pencegahan kebakaran adalah kegiatan protuksi terhadap bahaya

kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran. Dan pencegahan kebakaran. Dalam hal ini dilihat berdasarkan waktu tanggap yang dimiliki dalam penanggulangan kebakaran dan kemampuan melokalisir kebakaran agar tidak meluas.

Berikut kutipan wawancara dengan kompi Operasional, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawandalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran untuk melokalisir kebakaran agar tidak meluas ke bangunan lain :

Hasil wawancara : untuk melokalisir kebakaran yang terjadi, kita langsung melakukan penyemprotan dari mobil damker, dan petugas pemadam kebakaran yang lain mengempung lokasi kebakaran dan memadamkan api yang sudah berada atau akan mencapai bangunan lain disekitarnya agar api tersebut tidak meluas atau menyabar kebagunan lain.(wawancara dengan komandan kompi Operasi nal Dinas Pemadam Kebakran Kabupaten Pelalawanpada tanggal 28 Agustus 2019).

Selanjutnya wawancara terhadap kordan bencana kebakaran rumah mengenai waktu tanggap dan kemampuan melokalisir kebakaran sebagai berikut :

Hasil wawancara: waktu terjadinya kebakaran disini petugas pemadam kebakaran lama datangnya, membuat api semakin membesar dan merambat ke bangunan lain. kata petugas pemadam kebakaran tersebut, mereka tidak mengetahi telah terjadi kebakaran disini. Padahal kantor pemadam kebakaran itu dengan tempat terjadinya kebakaran tidak terlalu jauh, kira-kira 10 menit sudah sampai. (wawancara dengan salah seorang warga sekitar kebakaran di jalan simpang tigo Sorek pada tanggal 28 Agustus 2019).

Senada dengan yang disampaikan oleh korban kebakaran rumah, mengenai waktu tanggap dan kemampuan melokalisir yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.

Hasil wawancara: disaat terjadinya kebakaran, petugas pemadam kebakaran kewalahan dalam memadamkan api, hanya dengan menggunakan satu mobil damker dan 6 orang petugas operasional, yang membuat proses pemadaman menjadi lambat, sehingga api pun merambat ke toko sebelah rumah saya, melihat api tidak juga mati-mati masyarakat disini langsung mengambil air secara bersama-sama dan menyiram kobaran api, hampir 30 menit barulah api padam.(wawancara dengan salah seorang korban kebakaran rumah pada tanggal 28 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat petugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran belum efektif. Hal ini dilihat dari waktu yang dicapai untuk sampai ke lokasi kejadian kebakaran melebihi standar operasional prosedur, dan belum mampu melokalisir kebakaran agar tidak meluas serta menekan resiko dan kerugian kebakaran yang terjadi, selain itu petugas operasional juga kurang tanggap dan sigap dalam menekan kebakaran, karena berdasarkan wawancara di atas pada kejadian kebakaran petugas pemadam kebakaran malah telat sampai ke lokasi kebakaran membuat kebakaran semakin membesar dan meluas ke bangunan lain.

Diketahui bahwa tingkat kejadian kebakaran di Kabupaten Pelalawantahunnya bertambah dan kerugian yang ditimbulkan juga besar. Hal ini menunjukkan produktifitas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawandalam penanganan dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Pelalawanmasih kurang, karena belum mampu menekan dan meminimalisir kebakaran dan kerugian yang ditimbulkannya.

3. Tahap Operasional Pemadaman

Adalah tingkat keseringan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, dalam hal ini kegiatan penanggulangan bencana kebakaran

yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini intensitas waktu dan kualitas pelayanan pemadam kebakaran sudah menunjukkan efektivitas dan efisiensi tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Waktu tanggap (*respon time*) terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadam kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri dari; pertama, waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 (lima) menit. Kedua, waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi kebakaran selama 5 (lima) menit. Ketiga, waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 (lima) menit.

Berikut kutipan wawancara dengan Kasi Pencegahan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Intensitas waktu dan kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana kebakaran:

Hasil wawancara : karena kurangnya sarana dan prasarana seperti jumlah armada, waduk dan pos pemadam kebakaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran , kurangnya sarana dan prasarana ini dirasakan sangat menghambat pelayanan dan intensitas waktu dalam penanggulangan bencana kebakaran, selain kekurangan peralatan sebetulnya masih kekurangan sumberdaya, baik kualitas maupun kuantitasnya, banyak dari petugas yang belum mendapat pelatihan (wawancara dengan kasi pencegahan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 28 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi intensitas waktu dan kualitas pelayanan dalam menaggulangi

kebakaran oleh pemadam kebakaran kabupaten Pelalawanyaitu masih kurangnya sarana dan prasarana seperti armada dan sarana lainnya sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terganggu. Selain itu juga faktor penghambat lainnya ialah jumlah sumberdaya manusia yang kurang memadai yang membuat intensitas waktu petugas operasional dalam menaggulangi bencana kebakaran menjadi sedikit terganggu dan tidak sesuai dengan prosedur waktu yang ada di pemadam kebakaran. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan lebih memperhatikan lagi jumlah sarana dan prasarana, serta menambah jumlah sumberdaya manusianya, supaya pemadam kebakaran menjadi lebih baik lagi.

Berikut kutipan wawancara dengan Korban Kebakaran Rumah, mengenai Intensitas waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemadam kebakaran?

Hasil wawancara: disaat terjadinya kebakaran disini petugas pemadam kebakaran lama datangnya, padahal sudah ditelpon oleh warga disini untuk meminta bantuan. Setelah kobaran api semakin besar membakar rumah disini dan merambat kerumah yang lain, barulah petugas pemadam kebakaran datang dengan menggunakan 1 buah mobil damker, tapi usaha itu sia-sia juga karena rumah yang satunya sudah hangus terbakar. (wawancara dengan korban kebakaran rumah di Sorek, pada tanggal 28 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa intensitas waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Petugas pemadamkebakran disaat terjadinya kebakaran di lingkungan masyarakat, masih kurang yaitu disaat terjadinya kebakran petugas pemadam kebakaran telat sampai dilokasi kebakaran padahal sudah ditelpon oleh warga sekitar kebakaran. Setelah kebakran semakin membesar barulah petugas pemadam kebakaran sampai kelokasi dengan menggunakan 1 mobil damker. Ini membuat kinerja pemadam kebakran dipertanyakan. Karena sebagai instansi yang

menanggulangi kebakaran dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dia harus selalu siap siaga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya.

Dari berbagai kasus kebakaran diatas dapat disimpulkan bahwa masih tingginya angka kebakaran di Kabupaten Pelalawan, yang membuat efisiensi dan produktifitas kinerja pemadam kebakaran di ragukan. Masih banyaknya rumah penduduk, hutan yang ada di Kabupaten Pelalawanterbakar yang menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan rumah dan harta benda yang dimiliki, dengan adanya kasus kebakaran ini membuat petugas pemadam kebakaran agar lebih aktif langi dalam menanggulangi kebakaran di Kabupaten Pelalawan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Petugas Pemadam Kebakaran Belum Efisin dalam mengatasi bencana kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

4. Tahap Penyelamatan

Kerjasama Tim adalah merupakan upaya penyelesaian satu atau beberapa pekerjaan dalam kesatuan kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu analisi kinerja pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran di kabupaten Pelalawan.

Berikut penuturan seorang petugas operasional mengenai sikap saling percaya sesama petugas maupun atasannya.

Hasil wawancara: Sikap saling percaya sangat dibutuhkan dalam sebuah tim, apalagi taruhannya keselamatan manusia, meskipun ada keraguan diantara sesama petugas disaat seseorang mengambil sutau keputusan dalam menanggulangi kebakaran, karena itu sangat beresiko sekali baik dari dirinya sendiri maupun korban kebakaran, tapi karena kami semua sudah dilatih dengan baik, maka kami selalu percaya sama petugas yang sedang

bekerja.(wawancara dengan petugas operasional pada tanggal 27 Agustus 2019)

Berikut kutipan wawancara dengan Komandan Regu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai cara menciptakan sikap saling percaya sesama petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran.?

Hasil wawancara: sulit untuk menciptakan semua itu, apa lagi disaat memadamkan kebakaran , disaat itu lah ego masing-masing petugas keluar dan tak sejalan. Tapi saya sebagai ketua regu selalu memberikan masukan kepada petgas yang lain agar selalu bekerja sama, tapi ada juga petugas yang tak menghiraukan omongan saya. Apa lagi semua petugas panik melihat api yang besar. Semua ingin memadamkan.Sulit unuk menyatukannya.(wawancara dengan komandan regu (danru) pada tanggal 27 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bawa sulit bagi ketua regu untuk menyatukan sebuah tim disaat terjadinya kebakaran yang hebat, karena sema petugas memiliki ego yang tinggi dan merara mereka mampu untuk memadamkan api itu, tapi itu lah tugas yang seharusnya dilakukan oleh ketua regu untuk menyatukan sebuah tim untuk saling percaya sama lain, semoga pekerjaan yang sulit itu bisa diselesaikan dengan bersama sama. Dengan adanya sikap saling percaya maka kekompakan tim itu akan terjalin denngan baik dan dalam menggulangi kebakaran akan mudah.

Saling Menjunjung Tinggi dan Profesional Dalam Bekerja adalah sikap profesional sesama petugas dan menghargai hasil kerja sebagai suatu upaya sesama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.Profesional dalam bekerja sangat lah dibutuhkan karena membuat orang tersebut merasa dihargai.Sebagai

pemadam kebakaran yang jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka sikap profesional dalam bekerja sangat lah penting.

Berikut kutipan wawancara dengan Kasi pencegahan dan pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, mengenai profesional bekerja di dalam sebuah organisasi :

*Hasil wawancara : rata-rata belum semuanya petugas operasional yang memiliki keahlian yang cukup dan memahami tehknik-tehknik dalam penanganan bencana kebakaran. Namun sudah ada beberapa orang yang memiliki keahlian yang cukup, dan dari mereka inilah para petugas lain belajar baik langsung maupun tidak langsung mengenai pengetahuan tentang pemadam kebakaran (**wawancara dengan kasi pencegahan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 28 Agustus 2019**).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak semua petugas pemadam kebakaran itu memiliki kemampuan yang sama dalam menaggulangi kebakaran yang baik dan benar, tapi dengan bimbingan dan pelatihan yang diberikan oleh kepala bidang pemadam kebakaran kabupaten Pelalawan membuat mereka lebih paham lagi tata cara pemadaman yang baik dan benar. Sikap perofesional sangat lah penting didalam sebuah organisasi karena akan memberikan semangat kerja bagi karyawan/petugas yang ada diatas organisasi itu.

Anggota atau petugas saling berkoordinasi adalah kerjasama yang terarah antara petugas/pegawai dan atasan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan tujuan setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi serta sasaran yang hendak dicapai dari setiap pekerjaan atau kegiatan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kasi Pencegahan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KabupatenPelalawan mengenai, sikap saling berkoordinasi dalam bekerja :

Hasil wawancara: setelah mendapat informasi kebakaran dari masyarakat, saya langsung berkoordinasi kepada petugas operasional untuk turun langsung kelokasi kebakran. Dengan cara ini membuat kekompakan antara petugas, dalam bekerja akan selalu terjaga. (wawancara dengan kasi Pencegahan dan pengendalian Pemadam Kebakaran, pada tanggal 28 Agustus 2019)

Berikut kutipan wawancara dengan Komandan Regu (danru) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KabupatenPelalawan mengenai, bagai mana cara membuat sesama petugas selalu berkoordinasi dalam bekerja :

Hasil wawancara : dengan cara selalu mengajak semua petugas Operasional untuk selalu kompak dalam menaggulangi suatu masalah dan siap untuk bekerja sama.mungkin karna kurangnya sarana dan prasarana yang selalu membuat kami lambat dalam memadamkan kebakaran.(wawancara dengan Komandan regu (danru) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa sudah terjalin dengan baik kerja sama antara sesama petugas pemadam kebakaran, didalam menanggulangi kebakaran yang terjadi, mekipun sekali-kali ada kesalah pahaman antra petugas operasional di saat menanggulangi kebakaran. Ditambah masih kurangnya sarana dan prasaran yang membuat kerja mereka terhambat yang sering memicu kesalah pahaman saat menggunakan alat yang ada. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh petugas operasional lapangan mengenai sikap berkoordinasi,

Kurangnya koordinasi sesama petugas dilapangan selalu terjadi, karena disaat terjadinya kebakaran semua menjadi kacau, baik itu petugas pemadam kebakaran maupun masyarakat disekitar lokasi kebakaran, tapi kami selalu

diarahkan oleh komandan regu (danru) untuk selalu bekerjasama dan jangan panik disaat mengatasi kebakaran.(wawancara dengan petugas operasional pemadam kebakaran pada tanggal 28 Agustus 2019)

5. Pemadaman Selesai

Didalam menanggulangi kebakaran, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah sikap saling berkoordinasi sesama petugas pemadam kebakaran supaya kejanya menjadi baik dan kebakaran pun bisa diatasi, hal ini tidak udahnya dengan pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawandisaat terjadinya kebakaran mereka sesama petugas kurang berkoordinasi, sehingga didalam penanggulangan kebakaran akan menjadi terhambat dan sulit untuk diatasi. Tapi didalam sebuah tim pasti selalu ada ketuanya, yang mana ketua ini akan menyatukan setiap anggota-anggota untuk selalu bekerjasama.

Sesama Anggota Saling Mengisi dan Bekerjasama dalam Setiap Bentuk Pekerjaanadalah bekerjasama dalam melaksanakan setiap bentuk kegiatan yang diperintahkan oleh atasan dan Dinas, tidak memberikan tanggung jawab kepada sesama petugas dengan alasan apapun juga.

Berikut kutipan wawancara dengankasi pencegahan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawanmengeai mengapa kerja sama tim sangat di perlukan dibalam mengatasi masalah pemadaman.

?

Hasil wawancara: kerjasama merupakan faktor terpenting didalm sebuah organisasi, dengan adanya kerjasama yang baik maka semua pekerjaan akan selesai dengan baik juga.Untuk menciptakan kerjasama yang baik maka setiap petugas saling berkoordinasi dan saling menghargai satu sama yang lain.

(wawancara dengan kasi pencegahan dan pengendalian, pada tanggal 28 Agustus 2019).

Berikut kutipan wawancara dengan Petugas Operasional Lapangan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai mengapa kerja sama tim sangat di perlukan dibalam ngatasi masalah pemadaman :

*Hasi wawancara: sudah dua tahun saya menjadi petugas operasional, dan selama itu juga saya selalu ikut dalam menaggulangi kebakaran di Kabupaten Pelalawan, kami sesama petugas operasional selalu bekerja sama dalam menaggulangi kebakran, karena dengan kerjasama tim yang baik maka pekerjaan akan cepat kami selesaikan. Meskipun terkadang ada kesalah pahaman antara kami, y mungkin itu sudah sewajarnya. (wawancara dengan **Petugas Operasional Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Agustus 2019**).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak mudah menciptakan kejasama tim yang baik itu di saat situasi sedang kacau – kacaunya, banyaknya kesalah pahaman antra selama petuga pemadam kebakran, meskipun itu bersipat sewajarnya saja. Tapi pemadam kebakaran selalu mencoba tuntuk menjalin kerjasama tim yang baik dan saling berkoordinasi, karena dengan adanya kerjasama tim yang baik maka pekerjaan itu akan cepat diseleaikan, semoga saja pemadam kebakaran bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik, itu semua untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

Hubungan pimpinan dan bawahan adalah adanya kerjasama dan komunikasi dua arah yang terjalin antara pimpinan dan bawahan baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal diluar pekerjaan.pemimpin adalah simbol didalam organisasi yang harus dijaga kehormatannya oleh semua staf pendukung. Oleh karena itu, seorang

petugas harus mendukung pemimpinnya dengan semua keahlian dan keterampilan yang dimiliki

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai Hubungan Pimpinan dengan Bawahan di dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan :

Hasil wawancara : hampir 4 tahun saya memimpin di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan ini, hubungan antara saya dan petugas yang lain selalu baik-baik saja, dan terkadang ada sebagian petugas yang sering telat masuk kantor otomatis ada teguran dari saya, dan itu pun ditahap sewajarnya saja. (wawancara dengan Kepala Dinas Pemadamkebakaran pada tanggal 27 Agustus 2019)

Berikut kutipan wawancara dengan Kasi Pencegahan dan Pengendalian Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai selama menjadi petugas operasional pemadam kebakaran bagi mana hubungan dengan pimpinan :

Hasil wawancara : selama ini hubungan kami sesama petugas baik-baik saja, dan hubungan saya dengan pimpinan, baik itu Kepala Dinas, Kasi Pencegahan dan Pengendalian selama ini juga baik. (wawancara dengan Petugas Operasional Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Agustus 2019)

C. Hambatan dari Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan kebakaran.

Setelah dilakukan penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Bidang Kebakaran, di ketahui bahwa dalam melakukan tugasnya penanggulangan bencana kebakaran di pengaruhi oleh beberapa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan kebakaran sebagai berikut :

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam memberikan pelayanan dan penanggulangan bencana kebakaran. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki akan mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan penanggulangan bencana kebakaran. Sarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dinilai masih kurang lengkap, seperti masih kurangnya jumlah armada kebakaran, minimnya jumlah waduk / reservoir dan masih kurangnya jumlah pos pemadam kebakaran. Hal ini sesuai dengan penuturan dari kabid Linmas unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan mengenai sarana dan prasarana yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran di kabupaten Pelalawan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan kebakaran adalah Jadi dapat disimpulkan masih belum baiknya kerja pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran, yang mana semua itu dilihat dari temuan-temuan di lapangan. Dari Kualitas Pelayanan Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Bidang Kebakaran, peneliti menemukan masih belum efektifnya petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran.
2. Hambatan dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Pelalawan dalam Bidang Kebakaran yaitu peneliti menemukan masih banyaknya hambatan-hambatan yang membuat kinerja pemadam kebakaran menjadi terhambat, semua itu dapat dilihat dari sumberdaya manusia yang minim, sarana dan prasarana yang masih kurang dan financial (uang) yang jumlahnya masih kurang dari yang diharapkan.

B. Saran

1. Diharapkan perlu peningkatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan kebakaran dengan jalan pendidikan dan pelatihan

2. Diharapkan adanya penambahan sarana dan prasarana serta penambahan anggaran bagi pemadam kebakaran.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admosudirjo, 1989, *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan pemerintahan Desa*, Bandung, Angkasa
- Devey, Muchlis 1980, *Pemerintahan yang fektif*, Yogyakarta, Pustaka ANDI
- Fandi Tjiptono, 2006, *Pelayanan pada masyarakat*, Ghalia Indoensia, Jakarta
- H.A. Brasz, 1978, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta, Bina Aksara.
- Jones Kasten M, 1984, *Intisari manajemen*, Jakarta, PT Bina Aksara
- Kansil CST, 2003, *Hukum Administrasi negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kartohadikusumo, Halim, 1984, *Pengantar pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Lukman Hakim, 2004, *Pelayanan yang efektif*, Jakarta, Persada Dua
- M. Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana
- Moenir, 2003, *Organisasi dan Manajemen SDM*. Rajawali press, Jakarta
- Morrisan, 2005, *Hukum Tata Negera RI Era Reformasi*, Jakarta, Ramida Prakasa
- Musanef, 1992, *Sistem pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) III*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- _____ 1991, *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Nurcholis Majid, 2005, *Sistem Pemerintahan RI*, Aneka Cipta Jakarta
- Nugroho D Riant, 2003, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta, Elexmedia
- Pamudji, 1986, *kepemimpinan era baru*, Bumi Aksara Jakarta
- _____, 2004, *pelayanan dan kepuasan konsumen*, Bumi Aksara Jakarta

- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta, PT. Yarsif Watampone
- Simbolon Karya, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Surjadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT Refika Aditama, Jakarta
- Sedarmayanti. 2004. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta. Kencana
- Syafiie Kencana Inu, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung aditama
- Sarundajang, 2005, *Prospek Otonomidaerah di Negara RI*, Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Sianipar JP, 2004, *Pemberdayaan dan pemerintahan*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Suryaningrat Bayu, 1992, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung Kujang Press
- Sinambela P. 2011, *Kualitas Pelayanan*, Jakarta, Djambatan, Edisi Revisi
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Penelitian suatu pendekatan praktek* Jakarta Rineka Cipta,
- Sufian, 1995, *Organisasi Administrasi dan manajemen*, UIR Press Pekanbaru
- Soewarno, 1984, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Djambtaan, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju
- Tandjung Husen, 2003, *Ilmu pemerintahan dalam Organisasi*, Rineka Cipta Jakarta
- Terry G.R, 1978, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Rineka Cipta Jakarta
- Wahab Abdul, 1990, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, 2003, *Evaluasi pemerintahan Daerah*, Persada Nusa Cipta, Yogyakarta
- Wijaya HAW, 2002, *Pemerintahan Daerah*, Grafika Jakarta

B.Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menpan No.15 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Public*

Undang-Undang Otonomi Daerah, UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, CV. Restu Agung, Jakarta, 2008.

